

Ringkasan Risalah RUPS PT PLN Energi Gas
Tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
Tahun 2025

Hari, tanggal : Selasa, 06 Februari 2024
Tempat : Ruang Rapat PT PLN Bahtera Adhiguna, Jakarta
Peserta : Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi

| No | Agenda | Keputusan |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persetujuan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024 | Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024 |
| 2 | Persetujuan dan pengesahan Kontrak Manajemen / <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Tahun 2024 | Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen / <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Tahun 2024 |

Nomor : 0013/MNJ.01.02/DIREG/2024
Lampiran : 1 (satu)
Sifat : Segera
Perihal : **Undangan RUPS RKAP 2024
PT PLN Energi Gas**

15 Januari 2024

Kepada

Yth : 1. DIREKTUR UTAMA-PT PLN ENERGI
PRIMER INDONESIA
2. KETUA YPK - PT PLN (Persero)

Selaku Pemegang Saham
PT PLN ENERGI GAS
Centennial Tower, Lantai 7-8,
Jl. Gatot Subroto No 24-25 Setiabudi,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12930

Sehubungan akan dilaksanakan RUPS RKAP Tahun 2024 PT PLN Energi Gas dan memperhatikan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar PT PLN Energi Gas terkait pelaksanaan RUPS, dengan ini kami mengundang Bapak Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia dan Ketua YPK PT PLN (Persero) beserta jajaran perangkat Pemegang Saham PT PLN Energi Gas untuk menghadiri RUPS terkait Pengesahan RKAP PT PLN Energi Gas Tahun 2024 pada:


Hari/Tanggal : Senin / 05 Februari 2024
Waktu : 09:30 – 12.00 WIB
Dress Code : Baju Batik (Lengan Panjang)
Agenda : RUPS RKAP 2024 PT PLN Energi Gas
Tempat : Ruang Meeting Legian 1 Lt. G,
Hotel Gran Melia Jakarta

Jl. H. R. Rasuna Said No.Kav. X-0, Kuningan Tim., Kecamatan
Setiabudi, Kuningan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950

Demikian disampaikan, besar harapan kami atas kehadiran Bapak/Ibu pada agenda tersebut di atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR UTAMA
DIREKSI
MOH. RIZA AFFIANDI






TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TENTANG PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN KONTRAK MANAJEMEN TAHUN 2025 PT PLN ENERGI GAS

Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Kontrak Manajemen Tahun 2025 PT PLN Energi Gas yang dilaksanakan secara offline bertempat di Hotel Grandhika Iskandarsyah dan online melalui Video Conference (Hybrid), maka disampaikan Tata Tertib Pelaksanaan RUPS RKAP tersebut, sebagai berikut

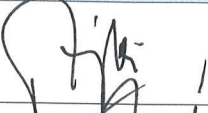





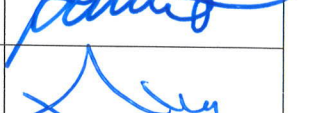
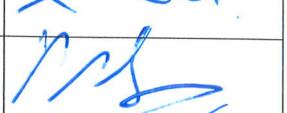

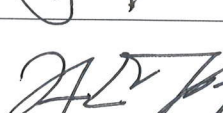

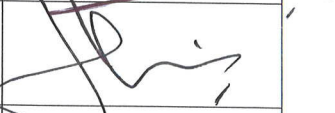



1. Tata Tertib Umum (Kehadiran Fisik maupun Online)
 1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia
 2. Peserta Rapat adalah:
 - a) Pemegang Saham (PT PLN Energi Primer Indonesia dan YPK PLN)
 - b) Direksi Perseroan
 - c) Dewan Komisaris Perseroan
 - d) Para Pejabat (BOD-1) dari Perseroan
 - e) Para Pejabat dari PLN Energi Primer Indonesia dan YPK PLN
 3. Rapat dipimpin oleh kuasa Pemegang Saham Mayoritas
 4. Highlight rundown RUPS:
 - a) Agenda Rapat sebagaimana dalam undangan RUPS
 - b) Durasi RUPS sebagaimana dalam undangan RUPS
 - c) Paparan Direksi Perseroan maksimal 20 menit
 - d) Laporan Dewan Komisaris Perseroan maksimal 10 menit
 - e) Tanya Jawab Pemegang Saham dan Direksi Perseroan
 5. Hanya Pemegang Saham yang mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan surat dalam Rapat.
 6. undangan atas permintaan Pimpinan Rapat dapat memberikan sumbangan pikiran namun masukan hanya untuk bahan pertimbangan Pemegang Saham dan masukan tersebut tidak dimuat dalam Risalah Rapat.
 7. Tanya Jawab:
 - a) Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat

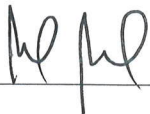


- 
- b) Pimpinan Rapat dan memberikan kesempatan kepada Undangan Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dan/atau usulan kepada Perseroan
 - c) Pertanyaan-pertanyaan hanya yang berhubungan dengan Agenda Rapat.
8. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat dalam rapat diajukan secara lisan
 9. Dalam hal pemungutan suara (voting) pada rapat akan dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam rapat. Batas Hak Suara/Voting Cap menyesuaikan dengan jumlah kepemilikan saham.
 10. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib Pelaksanaan RUPS RKAP ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat berdasarkan persetujuan Pemegang Saham.
2. Tata Tertib Khusus (Kehadiran Online)
- 1) Penamaan ID Peserta Rapat: Nama Perusahaan>Nama Pejabat/Jabatan (contoh: PLN EG/Edwin Bangun/DIRUT)
 - 2) Host dari PLN Energi Primer Indonesia dan Co-Host dari Perseroan yang akan membantu approve Peserta dari Perseroan, untuk itu mohon dikoordinasikan terlebih dahulu kepada PIC terkait apabila terdapat rencana kehadiran secara online.
 - 3) Status video Peserta Rapat pada posisi “On” selama berlangsungnya Rapat.
 - 4) Bagi Peserta yang tidak berbicara posisi audio “Mute”.

DAFTAR KEHADIRAN RUPS RKAP TAHUN BUKU 2025 PT PLN ENERGI GAS

Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Kontrak Manajemen Tahun 2025 PT PLN Energi Gas dihadiri oleh:

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | Dedeng Hidayat | Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi PLN EPI |
| 2 | Efin Febriantoro | Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN EPI |
| 3 | Rakhmad Dewanto | Direktur Gas & BBM PLN EPI |
| 4 | Amiruddin Ginting | YPK PLN |
| 5 | Dedi Budi Utomo | Komisaris Utama PLN EG |
| 6 | Bayu Satria Pratama | Komisaris PLN EG |
| 7 | Andriah Feby Misna | Komisaris PLN EG |
| 8 | Edwin Bangun | PLT Direktur Utama PLN EG |
| 9 | Rahmi Asnidar Harahap | PLT Direktur Keuangan dan SDM PLN EG |
| 10 | Yusuf Kusdinar | PLT Direktur Operasi PLN EG |
| 11 | Yeni P | Komite Nominasi dan Remunerasi PLN EG |
| 12 | Parlindungan Sihombing | Komite Nominasi dan Remunerasi PLN EG |
| 13 | Paul Kiring | Komite Audit PLN EG |
| 14 | Evi Purnama Sari | Sekretaris Perusahaan PLN EG |
| 15 | Muh. Nur Rafik | VP Konstruksi dan Operasi PLN EG |
| 16 | Affif Effendi | VP Perencanaan Korporat, Risiko dan Enjiniring PLN EG |
| 17 | Febrian Adiputra | VP Pengendalian Kontrak dan Pengembangan Bisnis |
| 18 | Abdul Hadi | Manajer Audit Internal |
| 19 | Randika Prabowo | VP Keuangan, SDM & Administrasi |
| 20 | Majuddin | VP Pengadaan |

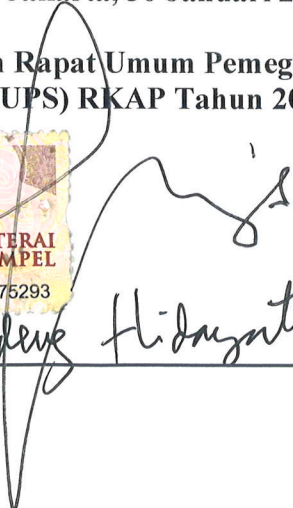
| NO | NAMA | INSTANSI | TANDA TANGAN |
|----|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | M. Juddin | PLN EG |  |
| | Muh. Nur Rafik | PLN EG |  |
| | Att Effendi | PLN EG |  |
| | Febrian Adiputra | PLN EG |  |
| | Abdul Hadi | PLN EG |  |
| | Eri Pranam | PLN EG |  |
| | Randika Prabowo | PLN EG |  |
| | Ariq Anan Ariq | PEG |  |
| | A Melda | PEG |  |
| | Yeni P | Komite PEG |  |
| | Brlindungan Schrobime | Komite MR PEG |  |
| | Paul Firing | Komite Adit PEG |  |
| | Ayus Purnomo | PLN EPI |  |
| | Johanne T. Wiranawan | PLN EPI |  |
| | Ingke | EPI |  |

| NO | NAMA | INSTANSI | TANDA TANGAN |
|----|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Paramita Purwanto | PLN EPI |  |
| | Murhinji | EPI |  |
| | Sutra . | Motaris |  |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Jakarta, 30 Januari 2025

Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RKAP Tahun 2025,




 (Depeng Hidayat)

Perolehan Suara RUPS RKAP

Berdasarkan Anggaran Dasar PT PLN Gas & Geothermal Pasal 25 Ayat 1(A) disampaikan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 51% (lima puluh satu persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan lain.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham pada Risalah RUPS RKAP Tahun Buku 2025 dengan suara bulat memutuskan:

| No | Agenda | Keputusan | Perolehan Suara |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Persetujuan dan pengesahan RKAP Tahun 2025 | Pemegang Saham dengan suara bulat menyetujui dan mengesahkan RKAP Tahun 2025 dengan pokok-pokok: a. Laporan Laba Rugi dan Komprehensif, b. Laporan Posisi Keuangan, c. Laporan Arus Kas, dan d. Investasi | Setuju: 100% Pemegang Saham/25.000 Saham Tidak Setuju: - Abstain: - |
| 2. | Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen/ Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2025 antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan | 1. Pemegang Saham dengan suara bulat menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen/Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2025. 2. Kontrak Manajemen/Key Performance Indicator Tahun 2025 Perseroan | Setuju: 100% Pemegang Saham/25.000 Saham Tidak Setuju: - Abstain: - |

RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
PT PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL ENERGI GAS
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)
TAHUN 2025
KAMIS, 30 JANUARI 2025

| | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| AGENDA PERTAMA | : Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2025 |
| AGENDA KEDUA | : Persetujuan dan Pengesahan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Tahun 2025 |

A. PENDAHULUAN

1. PT PLN Energi Gas ("**Perseroan**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 10 tanggal 28 Januari 2009 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-11269.AH.01.01.TAHUN 2009 tanggal 06 April 2009 dan telah didaftarkan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0014305.AH.01.09.TAHUN 2009 tanggal 06 April 2009 sebagaimana Anggaran Dasar tersebut terakhir diubah dengan Akta Nomor 23 tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Sutra Oktaviani, S.H., M.Kn., yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20 November 2024 dengan Nomor AHU-AH.01.09-0277418, maka RUPS diselenggarakan pada:

| | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hari/Tanggal | : Kamis, 30 Januari 2025 |
| Waktu | : Pukul 16.10 s.d 17.16 WIB |
| Tempat | : Hotel Grandhika, Ballroom Grand Wijaya 2, Jl. Iskandarsyah Raya No. 65, Melawai, Kota Jakarta Selatan Jakarta, Indonesia (<i>hybrid meeting</i>) |
| Acara | : 1. Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025; dan 2. Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen/ <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Tahun 2025. |

2. Hukum Pelaksanaan Rapat:

- I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- II. Anggaran Dasar Perseroan yang ditetapkan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 10 tanggal 28 Januari 2009 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-11269.AH.01.01.TAHUN 2009 tanggal 06 April 2009 dan telah didaftarkan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0014305.AH.01.09.TAHUN 2009 tanggal 06 April 2009 sebagaimana Anggaran Dasar tersebut terakhir diubah dengan Akta Nomor 23 tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Sutra Oktaviani, S.H., M.Kn., yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20 November 2024 dengan Nomor AHU-AH.01.09-0277418.

[Handwritten signature and initials in blue ink]

- III. Undangan RUPS RKAP 2025 Perseroan Nomor 0012.1/MNJ.01.02/DIREG/2025 tanggal 15 Januari 2025.
- IV. Risalah Rapat Direksi PT PLN Energi Primer Indonesia Nomor 02 tanggal 24 Januari 2025 tentang Persiapan RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 Anak Perusahaan PLN EPI.
- V. Surat Kuasa YPK PLN Nomor SKU.002/YPK-PLN/I/2025 tanggal 30 Januari 2025.

B. HADIR DALAM RUPS (OFFLINE)

1. Pemegang Saham

I. PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI)

- Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi : Dedeng Hidayat
- Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Efin Febriantoro R
- Direktur Gas dan BBM : Rakhmad Dewanto

II. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN

- Anggota Pengurus : Amiruddin Ginting

2. Dewan Komisaris

- PLT Komisaris Utama : Dedi Budi Utomo
- PLT Komisaris : Bayu Satria Pratama
- Komisaris : Andriah Feby Misna

3. Direksi

- PLT Direktur Utama : Edwin Bangun
- PLT Direktur Operasi : Yusuf Kusdinar
- PLT Direktur Keuangan & SDM : Rahmi Asnidar Harahap

C. JALANNYA RUPS

1. Pembukaan oleh Komisaris Utama;
2. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Komisaris Utama menyerahkan Pimpinan Rapat kepada Pemegang Saham;
3. Selanjutnya Notaris menyatakan bahwa dengan dipenuhinya persyaratan yuridis sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, maka RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat;
4. Pemaparan Direktur Utama dan Direksi Perseroan mengenai RKAP Tahun 2025;
5. Tanggapan Dewan Komisaris Perseroan mengenai RKAP Tahun 2025;
6. Pembahasan oleh Pemegang Saham atas Pemaparan Direksi dan Tanggapan Dewan Komisaris mengenai RKAP Tahun 2025;
7. Pembacaan Keputusan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2025;
8. Penandatanganan Risalah RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2025;
9. Penutupan oleh Komisaris Utama

D. KEPUTUSAN RUPS

AGENDA PERTAMA:

Setelah menilai RKAP Perseroan Tahun Buku 2025 yang diajukan oleh Direksi dan dilakukan pembahasan serta memperhatikan pendapat dan saran Dewan Komisaris, maka RUPS memutuskan menyetujui dan mengesahkan RKAP Tahun 2025 dengan pokok-pokok sebagai berikut:

(Handwritten signature and initials in blue ink)

a. Laporan Laba (Rugi) dan Komprehensif

Labanya (Rugi) Setelah Pajak Tahun Buku 2025 dianggarkan sebesar Rp. 96,27 Miliar dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Rp Miliar |
|----|-------------------------------------|---------------|
| 1 | Pendapatan Usaha | 484,41 |
| 2 | (BPP dan Beban Usaha) | (204,35) |
| 3 | Labanya (Rugi) Usaha | 280,06 |
| 4 | Pendapatan (Beban) Lain-Lain | (146,67) |
| 5 | Labanya (Rugi) Sebelum Pajak | 133,39 |
| 6 | Labanya (Rugi) Setelah Pajak | 96,27 |

b. Laporan Posisi Keuangan

Total Aset dan Ekuitas, Liabilitas per 31 Desember 2025 dianggarkan masing-masing sebesar Rp. 2.750,99 Miliar dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Rp Miliar |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Aset | | |
| 1 | Aset Tetap | 146,88 |
| 2 | Aset Tidak Lancar | 2.044,39 |
| 3 | Aset Lancar | 559,72 |
| 4 | Total Aset | 2.750,99 |
| Ekuitas dan Liabilitas | | |
| 1 | Ekuitas | 522,28 |
| 2 | Liabilitas Jangka Panjang | 1.872,31 |
| 3 | Liabilitas Jangka Pendek | 356,41 |
| 4 | Total Liabilitas dan Ekuitas | 2.750,99 |

c. Laporan Arus Kas

Saldo Kas per 31 Desember 2025 dianggarkan sebesar Rp. 197,14 Miliar, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Rp Miliar |
|----|-------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | Arus Kas dan Setara Kas dari Aktivitas Operasi | 134,51 |
| 2 | Arus Kas dan Setara Kas dari Aktivitas Investasi | (201,67) |
| 3 | Arus Kas dan Setara Kas dari Aktivitas Pendanaan | 150,93 |
| 4 | Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas | 83,78 |
| 5 | Saldo Awal Kas dan Setara Kas | 113,36 |
| 6 | Saldo Akhir Kas dan Setara Kas | 197,14 |

d. Investasi

Investasi Tahun Buku 2025 dianggarkan sebesar Rp. 777,00 Miliar, dengan *Disburse* sebesar Rp.201,67 Miliar, dialokasikan sebagai berikut:

| No | Uraian | Sumber Dana (Rp Miliar) | | Total |
|--------------|------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| | | Internal | SHL/Lainnya | |
| 1 | Investasi Rutin | - | - | - |
| 2 | Investasi Pengembangan Usaha | - | 201,67 | 201,67 |
| Total | | - | 201,67 | 201,67 |

AGENDA KEDUA:

1. RUPS menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen/*Key Performance Indicator* (KPI) 2025 antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan.
2. Kontrak Manajemen/*Key Performance Indicator* (KPI) 2025 Perseroan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari risalah ini.

(Handwritten signature and notes in blue ink)

E. ARAHAN RUPS:

1. Arahan Umum:

- a. Perseroan agar melakukan upaya terbaik dalam percepatan realisasi penugasan Pemegang Saham dengan tetap berprinsip kepada *Good Corporate Governance* (GCG) serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direksi diminta untuk melakukan langkah antisipasi yang terukur untuk semua aspek termasuk mengkoordinasikan mitigasi untuk risiko kebutuhan pendanaan.
- b. Perseroan diminta untuk melaksanakan Program Transformasi 2.0 sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang tercantum dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0125.K/DIR/2024 tentang Keanggotaan Pengelola Transformasi 2.0 PT PLN (Persero).
- c. Perseroan diminta untuk menyelaraskan program strategis yang ada di lingkungan SH/AP sesuai dengan empat pilar Program Transformasi 2.0 yaitu *Growth Moonshot*, *Digital Moonshot*, *NZE Moonshot*, dan *Moonshot Launchpad*.
- d. Perseroan diminta untuk meningkatkan efisiensi biaya dan memperhatikan bahwa total biaya dalam RKAP 2025 merupakan pagu maksimal dan target pendapatan merupakan batas minimal yang harus dicapai. Biaya dalam RKAP 2025 dimungkinkan melebihi pagu apabila mampu menghasilkan pendapatan yang melebihi tambahan pengeluaran biaya tersebut dengan didukung oleh kajian (*Cost Benefit Analysis*) dan sesuai dengan kaidah GCG. Perseroan dengan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan diminta untuk mengendalikan BPP dan *Non Allowable Cost* (NAC) untuk meminimalkan potensi kerugian dan menjaga *sustainability* Perseroan dan PLN EPI.
- e. Perseroan diminta untuk meningkatkan pangsa pasar di luar PLN EPI group sesuai kompetensi utama bisnis Perseroan dengan tetap memperhatikan *risk appetite* Perseroan serta mengutamakan *security of supply* PLN EPI group.

2. Aspek Manajemen Risiko dan GCG:

- a. Perseroan wajib menerapkan manajemen risiko dan tata kelola terintegrasi secara efektif melalui penyelarasan kebijakan manajemen risiko, dan perencanaan strategis berbasis risiko melalui penerapan *risk capacity*, *tolerance*, *appetite*, dan *limit* yang merupakan bagian dari strategi bisnis Perseroan yang selaras dengan PLN EPI.
- b. Perseroan agar menyusun RKAP 2025 berbasis manajemen risiko sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan strategis Risiko PLN EPI dan dokumen Strategi Risiko PLN EPI tahun 2025.
- c. Perseroan wajib menetapkan tata kelola risiko secara efektif sesuai dengan ketentuan dalam Permen BUMN RI Nomor Per-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara berdasarkan kategori dan klasifikasi risiko Perseroan yang ditetapkan oleh Direktur Utama PLN EPI.
- d. Perseroan wajib menyusun strategi Risiko mengikuti ketentuan Keputusan Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI Nomor:SK-6/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Proses Manajemen Risiko dan Agregasi pada Taksonomi Risiko Portofolio Badan Usaha Milik Negara, serta menyelaraskan *risk appetite framework* (*risk capacity*, *risk appetite statement*, *risk tolerance*, dan *risk limit*) sesuai kebijakan yang ditetapkan PT PLN (Persero) dan PLN EPI.
- e. Perseroan diminta untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas dan *responsiveness* implementasi proses *Four Eyes Principle* dalam verifikasi, validasi perencanaan program investasi Perseroan serta entitas terkonsolidasi di bawah Perseroan, dan mekanisme pengambilan keputusan korporasi lainnya berlandaskan prinsip *Governance Risk and Compliance*.

Handwritten signature and initials in blue ink.

- f. Perseroan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal secara efektif meliputi perancangan, pengujian, pemantauan, dan pelaporan tujuan operasional, serta laporan keuangan dan kepatuhan melalui pemisahan fungsi yang jelas dari lini pertama ke lini kedua, serta evaluasi efektivitas pengendalian internal minimal satu kali setahun yang dilakukan oleh lini ketiga.
 - g. Perseroan wajib menyusun rencana darurat (*contingency plan*) secara realistis dan komprehensif yang mencakup strategi rencana aksi (*recovery plan*) dan opsi pemulihan (*recovery options*) serta opsi resolusi (*resolution plan*) terhadap kedaruratan (*contingency*).
 - h. Perseroan agar mengidentifikasi dan memitigasi risiko terkait *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dan penerapan TJSJ secara holistik yang relevan dengan fungsi SDM, IT, Hukum, dan Perundang-Undangan.
 - i. Perseroan diminta untuk melakukan implementasi ERP dan SSOT sebagai tindak lanjut implementasi di PLN EPI Grup dengan berkoordinasi dengan bidang TIG PLN EPI.
 - j. Perseroan diminta untuk perkuatan sistem *cyber security* terutama dalam pengawasan penggunaan *software* ilegal dan aktivitas transfer data kritikal.
3. Aspek Keuangan:
- a. Perseroan agar memperhatikan dan mematuhi semua *covenant* sesuai dengan perjanjian pinjaman PT PLN (Persero) termasuk namun tidak terbatas pada *Indenture Global Bond* dan Perjanjian Pinjaman lainnya serta Anggaran Dasar Perusahaan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian, integritas, dan *Good Corporate Governance* (GCG).
 - b. Perseroan diminta untuk melakukan peninjauan sumber-sumber pendanaan alternatif untuk pembiayaan aksi korporasi dalam perencanaan investasi pengembangan usaha dengan selalu berkoordinasi dengan Divisi Pembina dan Direktorat Teknis PLN EPI.
 - c. Perseroan melakukan pengendalian internal atas Laporan Keuangan secara berkala melalui implementasi *Internal Control Over Financial Reporting* ("ICOFR") serta secara periodik melakukan update khususnya proses bisnis dan *Risk Control and Matrix* ("RCM") untuk memastikan bahwa laporan keuangan akurat, andal dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - d. Perseroan agar mempersiapkan implementasi IFRS S1 S2 dimana perlu adanya konektivitas antara laporan keuangan dengan laporan keberlanjutan yang holistik, komprehensif, dan koheren mencakup pengungkapan keuangan terkait keberlanjutan, sehingga Investor akan memahami bagaimana hal-hal yang dilaporkan dalam laporan keuangan dan laporan keberlanjutan saling berkaitan.
 - e. Perseroan diminta untuk menyelesaikan Audit Laporan Keuangan Tahun 2024 tepat waktu dan meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan dengan opini auditor terhadap laporan keuangan *audited* Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar Dalam Semua Hal yang Material.
 - f. Perseroan agar dapat mempertahankan *Sustainable Financial Position* dan rasio keuangan yang sehat melalui peningkatan pendapatan Beyond kWh, produktivitas aset, pengendalian BPP, kontribusi *value creation* untuk korporasi, penerapan ICOFR, menunjukkan kapasitas pembayaran dividen kepada pemegang saham, serta *tax optimization* pada setiap aksi korporasi sesuai ketentuan.
 - g. Perseroan agar melakukan pencatatan akuntansi sesuai dengan sumber anggaran serta melakukan pengendalian beban untuk mendukung pertumbuhan kinerja perusahaan.
 - h. Perseroan agar menerapkan prinsip kehati-hatian, terutama dalam membuat *Memorandum of Understanding/Letter of Intent/Perjanjian* bisnis, serta melakukan asesmen/identifikasi untuk dapat meminimalisasi risiko dan menghindari dampak negatif terhadap liabilitas kontinjensi, hukum, *covenant*, dan reputasi perusahaan

ni p k s 2024 12 18 2025 5 1 1/2 15

- i. Perseroan agar melakukan optimalisasi dan kontribusi dalam efisiensi dan penurunan BPP melalui evaluasi target pertumbuhan berkualitas tinggi, pengendalian biaya dan target pendapatan, serta melakukan inovasi untuk meningkatkan efisiensi operasional.
 - j. Perseroan agar melakukan pengelolaan investasi sesuai dengan Peraturan Direksi PLN EPI dan ketentuan lain yang berlaku dan melalui Tim Verifikasi Validasi (“TVV”) dan Komite Investasi (“KI”) guna menjamin transparansi dan akuntabilitas.
 - k. Perseroan diminta memperbaiki siklus investasi, sejak pada tahap perencanaan, eksekusi dan evaluasi khususnya tahapan monitoring dan *debottlenecking* yang dipimpin langsung oleh Direksi di setiap tahapannya sehingga menghasilkan *deliverable* program investasi sesuai yang direncanakan serta mencapai sasaran tingkat penyerapan anggaran kas investasi.
 - l. Perseroan diminta untuk senantiasa melakukan efisiensi biaya, yaitu pada penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam biaya administrasi dan optimasi biaya kepegawaian.
4. Aspek Sumber Daya Manusia:
- a. Perseroan diminta untuk meningkatkan *maturity Human Capital* (HC) dengan pengelolaan praktik bisnis yang berkelanjutan.
 - b. Perseroan diminta untuk meningkatkan produktivitas melalui rasio *Earnings Before Interest and Taxes* (EBIT)/ Pegawai dan *Return on Investment* (ROI) HC.
 - c. Perseroan diminta untuk melakukan pengendalian RKAP biaya kepegawaian dengan tidak melebihi penetapan baik total Pagu RKAP maupun Penetapan Pagu Sub Pos Biaya Kepegawaian.
 - d. Perseroan diminta untuk melakukan upaya meningkatkan *employee engagement* dan *employee productivity*.
 - e. Perseroan diminta untuk dapat melakukan penataan terhadap karyawan eksisting yang organik dan karyawan tugas karya sehingga agar dapat berkontribusi secara optimal.
 - f. Perseroan diminta untuk dapat menyampaikan rencana program rekrutment pegawai organik di tahun 2025 kepada PLN EPI untuk kemudian akan dimintakan persetujuan kepada Divisi HTD PT PLN (Persero).
 - g. Perseroan agar dapat mengelola biaya kepegawaian secara efektif dan efisien sehingga tidak terjadi *overshoot*.
 - h. Perseroan diminta untuk meningkatkan keberagaman talenta dalam *nominated talent* perusahaan, khususnya melalui pengembangan talenta muda dan talenta perempuan.
 - i. Perseroan diminta untuk menyelaraskan Organisasi dengan strategi bisnis Perseroan dengan tetap memperhatikan Efektifitas Organisasi serta Dampaknya terhadap Produktivitas *Human Capital*.
5. Aspek Bisnis dan Operasional:
- a. Perseroan diminta memastikan terciptanya keselamatan serta kesehatan dan lingkungan hidup di seluruh lingkungan kerja, budaya K3 secara berkelanjutan, kesiapan proteksi kebakaran, serta memenuhi standar K3L lainnya yang berlaku dan mewujudkan *zero accident*.
 - b. Perseroan agar menindaklanjuti RJPP yang telah disahkan melalui eksekusi RKAP tahunan serta akuntabilitas yang jelas di seluruh jajaran organisasinya, serta membangun mekanisme monitoring dan *review* yang *robust* dan *agile* melalui pelaksanaan *Strategy Orchestration Meeting* dan Forum Rapat Pimpinan Perseroan.
 - c. Perseroan diminta agar meningkatkan *maturity* dan tata kelola dalam penyusunan kajian kelayakan proyek untuk usulan investasi sehingga diperoleh usulan investasi yang siap eksekusi dan memberi manfaat maksimal bagi Perseroan.
 - d. Perseroan diminta untuk dapat fokus dan mengoptimalkan *core business* dan bersinergi terhadap Anak Perusahaan lainnya di dalam PLN EPI Grup.

~ p f l y a d a t i a D i s d r f ^ M x v

- c. Perseroan diminta untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi atas aksi korporasi yang dilakukan Perusahaan secara berkala dan menyampaikan laporan aksi korporasi tersebut secara berkala kepada PLN EPI c.q. Satuan Perencanaan Korporat dan Manajemen Energi Primer dan Bidang Legal setiap akhir triwulan tahun berjalan.
 - d. Perseroan diminta untuk melakukan upaya terbaik dalam penyelesaian isu hukum yang terjadi dengan PT Sulawesi Regas Satu (SRGS) dengan mempertimbangkan Perjanjian yang telah disepakati dalam LOMA serta mengedepankan prinsip GCG dalam pelaksanaannya.
 - e. Perseroan diminta melaksanakan pemilihan mitra strategis dalam rangka penugasan pengembangan usaha sesuai dengan regulasi yang berlaku dan memperhatikan GCG serta melaporkan update-nya secara berkala kepada PLN EPI c.q. Direktorat Teknis PLN EPI dan Satuan Perencanaan Korporat dan Manajemen Energi Primer.
7. Buku RKAP Tahun Buku 2025 dan Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari risalah ini, dan selanjutnya Perseroan agar melaporkan pelaksanaan RKAP Tahun Buku 2025 beserta seluruh Arahan Pemegang Saham di atas secara berkala dalam periode Triwulanan kepada Satuan Perencanaan Korporat dan Manajemen Energi Primer (RENKO MEP) PLN EPI.

Dewan Komisaris,

Dedi Budi Utomo
PLT Komisaris Utama

Bayu Satria Pratama
PLT Komisaris

Andriah Feby Misna
Komisaris

Direksi,

Edwin Bangun
PLT Direktur Utama

Yusuf Kusdinar
PLT Direktur Operasi

Rahmi Asnidar H
PLT Direktur Keuangan &
SDM

Pemegang Saham Perseroan

PT PLN Energi Primer Indonesia

Dedeng Hidayat
Direktur Manajemen Human
Capital dan Administrasi

Efin Febriantoro R
Direktur Keuangan dan
Manajemen Risiko

Rakhmad Dewanto
Direktur Gas dan BBM

Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN

Amiruddin Ginting
Anggota Pengurus

ni p... 8/1/2025

SURAT KUASA
TENTANG
UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)
TAHUN BUKU 2025
PT PLN ENERGI GAS
Nomor: ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Jabatan :

Berdasarkan Akta Notaris Nomor tanggal, dibuat di hadapan, Sarjana, Notaris di dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor tanggal

Bertindak untuk dan atas nama,

Nama PT : PLN ENERGI GAS
Alamat PT : Menara Bidakara 2 Lt. 10 Jl. Gatot Subroto, Kav. 71-73, Tebet,
Jakarta Selatan 12870

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMBERI KUASA.

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama :
NIK :
Jabatan :
Kedudukan :

Berdasarkan Akta Notaris Nomor tanggal, dibuat di hadapan, Sarjana, Notaris di dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor tanggal

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENERIMA KUASA.

----- KHUSUS -----

Untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam urusan melakukan perbuatan-perbuatan untuk kepentingan Pemberi Kuasa, oleh karenanya kepada Penerima Kuasa diberikan kuasa sebagai berikut:

- a. Untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan atau disarankan dengan tujuan melaksanakan seluruh tugas, wewenang, dan kewajiban Pemberi Kuasa untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Rencana Kerja Anggaran Perusahaan ("**RKAP**") tahun buku 2025 PT PLN Energi Gas ("**PLN EG**") dengan agenda sebagaimana diberitahukan oleh Direksi PLN EG dalam Surat undangan RUPS sebagaimana terlampir.
- b. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan hal-hal yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa berkaitan dengan maupun yang menunjang hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang dikuasakan tersebut di atas, Penerima Kuasa berpedoman pada Anggaran Dasar dan Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi PT PLN Energi Gas. Surat Kuasa ini diberikan hak substitusi baik seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, (tanggal) (bulan) (tahun)

PENERIMA KUASA,
(Jabatan)

PEMBERI KUASA,
(Jabatan)

(Nama)

(Nama)